

Revitalisasi Sayap Partai Politik Sebagai Kelompok Kepentingan Andreas Pandiangan

Sayap partai politik sebagai bagian partai politik memiliki posisi strategis di dalam proses dan dinamika Sistem Politik Indonesia. Posisi strategis dapat dicapai bila sayap partai politik berhasil menjadi kelompok kepentingan. Hal yang sesuai dengan kehendak parpol masing-masing. Dengan menjadi kelompok kepentingan dalam konteks proses dan dinamika SPI, sayap parpol akan membantu tujuan parpol. Namun, kenyataan berbicara lain. Untuk itu perlu dilakukan revitalisasi sayap parpol melalui 4 langkah yang ditawarkan Nasikun. Usahakan revitalisasi sayap-sayap parpol tentunya akan berakhir pada kemampuan sayap-sayap parpol berinteraksi mengelola dan memperjuangkan aspirasi anggotanya dan masyarakat ke dalam proses dan dinamika Sistem Politik Indonesia.

The wings of political parties as part of political parties have a strategic position in the process and dynamics of the Indonesian Political System. Strategic position can be achieved if the wings of political parties succeed in becoming interest groups. This is in accordance with the wishes of the respective political parties. By becoming an interest group in the context of the process and dynamics of the Indonesian Political System, the political parties' wings will help the political parties' goals. However, reality speaks differently. For this reason, it is necessary to revitalize the wings of political parties through the 4 steps offered by Nasikun. Try to revitalize the wings of political parties will ultimately end in the ability of the political parties wings to manage and fight for the aspirations of their members and the community into the process and dynamics of the Indonesian Political System.

A. Pendahuluan

Sebagai bagian tidak terpisahkan dari partai politik (parpol), keberadaan sayap parpol, saat di Orde Baru dikenal dengan nama *onverbouw*-organisasi payung, tentunya tidak sekadar pelengkap keberadaan parpol.

Yang dimaksud dengan tidak sekadar pelengkap keberadaan parpol mencakup tidak hanya mesin pencari dukungan parpol dari kelompok masyarakat tertentu di saat pemilu. Termasuk tidak hanya hiasan politik struktur parpol tertentu guna melengkapi keragaman dukungan masyarakat.

Padahal secara konseptual, peran sayap parpol diharapkan lebih dari kondisi tersebut yakni berperan aktif dalam sistem politik Indonesia yang berubah total pasca reformasi. Dari sisi perjuangan kepentingan aspirasi, sayap politik termasuk bagian dari jenis kelompok kepentingan dalam konteks dinamika sistem politik.

Sayap parpol dikategorikan sebagai kelompok kepentingan karena didirikan atas identitas kepentingan keragaman kelompok di masyarakat seperti pelajar, pemuda, perempuan, mahasiswa, pengusaha dan lain sebagainya.

Namun, jujur diakui bahwa sampai saat ini ketidakmaksimalan peran sayap parpol dalam sistem politik Indonesia belum maksimal sebagaimana peran sebuah kelompok kepentingan. Sayap parpol tidak mampu mengagregasikan dan mengartikulasikan kepentingan organisasi dan anggotanya dalam Sistem Politik Indonesia (SPI).

Tulisan ini akan membahas perihal SPI dan kerjanya, sayap parpol sebagai kelompok kepentingan, gambaran ringkas sayap parpolpeserta pemilu 2014 yang memiliki kursi di DPR RI dan usaha revitalisasi sayap parpol dalam SPI.

B. Pembahasan

B.1. Sistem Politik

Pasca reformasi, SPI mengalami perubahan total, baik dari sisi struktur dan dinamikanya. Diawali dengan perubahan akibat Amademen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan Keempat UUD 1945 itu telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar.¹

David Easton menyatakan bahwa sistem politik adalah merupakan alokasi dari pada nilai-nilai, dalam mana pengalokasian dari pada nilai-nilai tadi bersifat memaksa atau dengan kewenangan, dan pengalokasian yang bersifat paksaan tadi mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan.²

Sedangkan Robert A. Dahl menyatakan bahwa sistem politik adalah sebagai pola yang tetap dari hubungan-hubungan antar manusia yang melibatkan—sampai dengan

¹Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, SH, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 1.

²Haryanto, Sistem Politik: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 15.

tingkat yang berarti—kontrol, pengaruh, kekuasaan, ataupun kewenangan. Ahli lain, Grabiell A. Almond menyatakan bahwa sistem politik adalah merupakan sistem interaksi yang terjadi di dalam masyarakat yang merdeka.³

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat kita katakan bahwa sistem politik adalah merupakan sistem interaksi atau hubungan yang terjadi di dalam masyarakat, melalui mana dialokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, dan pengalokasian nilai-nilai itu dengan mempergunakan paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah. Dengan melibatkan tingkat yang berarti seperti kontrol, pengaruh, kekuasaan, ataupun kewenangan dari pihak tertentu.

Dengan berpijak dari pengertian tersebut ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain: adanya sistem interaksi, pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat dan paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah. Serta melibatkan kontrol, pengaruh, kekuasaan, ataupun kewenangan dari pihak tertentu.

Sebagai sebuah sistem, kehidupan politik mempunyai 4 (empat) karakteristik utama yakni:⁴*Pertama*, sifat-sifat identifikasi, artinya sistem politik memiliki ciri khas yang membedakannya dengan sistem sosial lain. *Kedua*, masukan dan hasil (*input dan output*). Keputusan yang mengikat (*authoritative decisions*) merupakan pusat perhatian studi politik, karena ia berpengaruh penting terhadap masyarakat. Keputusan mengikat itu disebut keluaran (*output*). Agar suatu sistem dapat terus berlangsung, ia harus mendapatkan masukan (*input*) dari lingkungannya. Tanpa masukan, sistem tidak akan dapat bekerja, dan tanpa keluaran kita akan dapat mengetahui apa saja yang telah dikerjakan sistem.

Ketiga, deferensiasi di dalam sistem. Sistem yang bekerja untuk mengubah masukan yang diperoleh dari lingkungan menjadi suatu jenis keluaran, tidak mungkin mengerjakan pekerjaan yang beraneka ragam dalam waktu bersamaan. Untuk itu struktur-struktur di dalam sistem harus mengenal diferensial minimal.

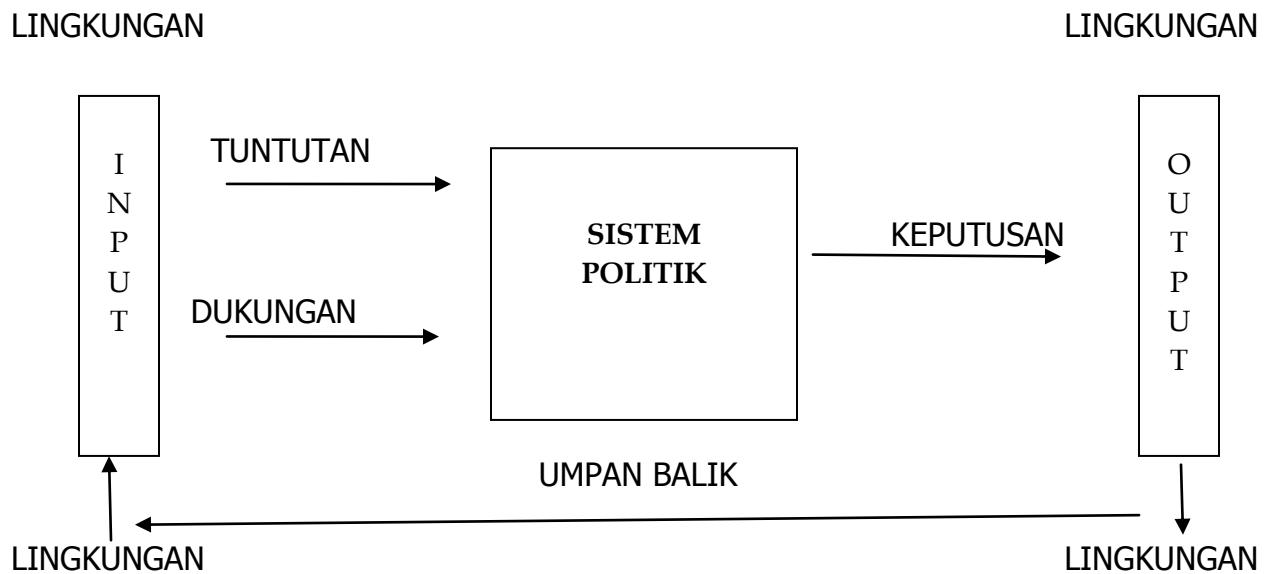
³*Ibid.*

⁴David Easton, Analisis Sistem Politik dalam Roy C. Macridis-Bernard E. Brown, Perbandingan Politik, Erlangga, Jakarta, 1992, hlm. 36-39.

Keempat, integrasi suatu sistem. Diferensiasi struktural yang selalu berubah secara potensial dapat menghancurkan integrasi sistem.

David Easton membangun sebuah model kegunaan untuk politik. Model ini menggambarkan hubungan antara subsistem-subsistem dan sistem-sistem dalam masyarakat seperti dalam gambar 1.1. Berikut: ⁵

Gambar 1.1.
SISTEM POLITIK



Hasil keluaran proses sistem politik berupa keputusan/kebijakan dan tindakan. Keluaran sistem politik tersebut secara otomatis akan mendatangkan respon dari pihak-pihak yang sebelumnya mendukung atau menuntut. Bahkan juga respon dari lingkungan sistem politik itu sendiri. Respon secara sederhana dapat bersifat positif maupun negatif. Respon secara otomatis akan menjadi proses umpan balik bagi sistem politik tersebut. Bila positif berarti akan menjadi dukungan pada sistem politik. Sementara bila respon yang timbul bersifat negatif akan melahirkan tuntutan pada sistem politik.

⁵David E. Apter, Pengantar Analisa Politik, LP3ES, Jakarta, hlm. 252.

Input sistem politik dapat dibagi 2, yaitu input tuntutan (*demand*) dan input dukungan (*support*). Input-input inilah yang memberikan bahan mentah dan informasi yang harus diproses sistem politik, dan juga sebagai energi bagi kelangsungan sistem politik.⁶

Tuntutan terjadi jika ada perbedaan kepentingan antara individu, masyarakat dan lingkungan sistem politik dengan apa yang dihasilkan oleh sistem itu sendiri. Adanya tuntutan-tuntutan dari individu, masyarakat dan lingkungan sistem yang kesemuanya tidak dapat dipenuhi merupakan alasan mengapa suatu sistem politik terbentuk dalam suatu masyarakat atau merupakan alasan mengapa orang melibatkan diri dalam kegiatan politik.

Terdapat 2 jenis tuntutan yakni dari lingkungan di sekitar sistem itu (lingkungan eksternal) dan dari lingkungan sistem itu sendiri (lingkungan internal). Tuntutan eksternal berasal dari sistem sosial, ekonomi, fisik dan budaya baik dari lingkungan domestik maupun lingkungan internasional. Sedangkan input tuntutan internal merupakan masukan yang timbul dan berasal dari situasi-situasi yang terjadi di dalam sistem politik.

Pertanyaannya, bagaimana tuntutan-tuntutan itu dirubah menjadi isu-isu politik? Isu politik adalah suatu tuntutan yang oleh anggota-anggota masyarakat ditanggapi dan dianggap sebagai hal yang penting untuk dibahas melalui saluran-saluran yang disepakati dalam sistem politik tersebut. Perbedaan antara tuntutan dengan isu politik adalah pada bagaimana mengubah tuntutan menjadi isu politik.

Dukungan terjadi jika ada kesesuaian kepentingan antara individu, masyarakat dan lingkungan sistem politik dengan apa yang dihasilkan oleh sistem politik. Input dukungan sama vitalnya dengan input tuntutan, disebabkan jika input tuntutan hanyalah bahan dasar untuk membuat produk akhir (keputusan), sistem politik juga memerlukan energi dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Energi yang dimaksud adalah berupa tindakan-tindakan atau pandangan-pandangan yang

⁶David Easton, *Analisis Sistem Politik* dalam Roy C. Macridis-Bernard E. Brown, *Perbandingan Politik*, Erlangga, Jakarta: Erlangga, 1992, hal. 42-51.

memajukan sistem politik. Tanpa dukungan, tuntutan-tuntutan tidak akan dapat dipenuhi atau konflik mengenai tujuan tidak akan terselesaikan.

Input dukungan menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu dukungan yang dinyatakan secara terbuka (*over action*) dan dukungan yang tidak dinyatakan secara terbuka melainkan dukungan dalam bentuk sikap atau suasana pikiran (*covered action*). Dukungan berupa suasana pikiran ini merupakan input yang vital bagi bekerjanya dan bagi kelangsungan suatu sistem politik, menurut Easton, dukungan diberikan harus ditujukan kepada objek yaitu komunitas politik, rejim dan pemerintahan. Dukungan kepada rejim merupakan dukungan kepada semua peraturan mengatur cara menangani tuntutan yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut dan cara melaksanakan keputusan.

Dukungan yang terus menerus merupakan kebutuhan energi sistem politik, sehingga dapat mengubah tuntutan menjadi output atau keputusan politik. Untuk memperoleh dukungan yang terus menerus, sistem politik menggunakan 2 (dua) cara, yakni (1) menyesuaikan output dengan input tuntutan dan (2) dengan cara politisasi.

Yang dimaksud dengan cara pertama, menyesuaikan output dengan input tuntutan adalah bahwa apapun tuntutan keputusan politik dari sistem diusahakan agar sesuai dengan tuntutan masyarakat. Kalau sistem tidak mampu memenuhi tuntutan anggota masyarakat maka arus dukungan akan berkurang bahkan mungkin akan hilang sama sekali. Akan tetapi ada kemungkinan dukungan dari masyarakat tidak datang sebagai akibat dari keuntungan yang diterimanya, melainkan karena adanya paksaan atau ancaman bagi anggota sistem. Namun semakin demokratis suatu sistem politik semakin rendah porsi paksaan untuk mendapatkan dukungan. Sebaliknya, semakin otoriter suatu sistem politik semakin tinggi pulalah porsi paksaan untuk memperoleh dukungan. Selain itu pula, sistem dapat memperoleh dukungan tanpa selalu memenuhi tuntutan masyarakat melainkan menggunakan apa yang disebut dengan cadangan dukungan.

Cadangan dukungan merupakan suatu situasi yang mendukung sistem akibat hubungan yang dibina oleh pemerintah yang lagi memerintah. Cadangan dukungan

dapat berasal dari partai politik, kelompok militer, dan kelompok masyarakat yang mendukung sistem. Partai politik, kelompok militer dan kelompok masyarakat yang mendukung sistem, merupakan modal utama bagi pemerintah untuk membuat dan menjalankan kebijakan yang memang tidak selalu sesuai dengan tuntutan anggota masyarakat.

B.2. Kelompok Kepentingan

Salah satu komponen yang menjadi aktor input dalam SPI adalah kelompok kepentingan. Nasikun merumuskan kelompok kepentingan sebagai kelompok yang mempunyai karakteristik tersendiri yang berhubungan dengan suatu legitimasi atas suatu pola hubungan-hubungan kekuasaan otoritatif dengan mereka yang tidak memiliki kekuasaan otoritatif.⁷

Dengan memperhatikan proses dan dinamika SPI dan memahami konsep kelompok kepentingan maka sayap parpol merupakan kelompok kepentingan dalam dinamika SPI. Kondisi ideal tersebut seiring dengan pemahaman dan kajian akan semangat dan menelaah tujuan pembentukan sayap parpol.

Lalu diskusi berlanjut bagaimana agar sayap parpol berhasil memposisikan dirinya sebagai kelompok kepentingan dalam SPI?. Nasikun mensyaratkan minimal 4 hal yang harus dimiliki sayap parpol agar berhasil menjadi kelompok kepentingan.

Syarat dimaksud yakni: 1. Lembaga-lembaga harus merupakan yang bersifat otonom dengan wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan tanpa campur tangan dari badan-badan lain yang ada di luarnya. 2. Kedudukan Lembaga-lembaga tersebut di dalam masyarakat yang bersangkutan harus bersifat monopolistis. 3. Peranan lembaga-lembaga tersebut haruslah sedemikian rupa sehingga berbagai kelompok kepentingan yang berlawanan satu sama lain itu merasa terikat kepada lembaga-lembaga tersebut, sementara keputusan-keputusannya mengikat kelompok-kelompok tersebut beserta dengan para anggotanya. 4. Lembaga-lembaga tersebut harus bersifat demokratis.⁸

⁷Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1985, hlm. 20.

⁸*Ibid.*, hlm. 24-25.

B.3. Sayap Parpol

Untuk pertama kalinya, sayap parpol diatur Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Pasal 12 huruf (j) menyatakan bahwa salah satu hak partai politik adalah membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik. Penjelasan pasalnya menyebutkan bahwa organisasi sayap sendiri menurut UU No. 2 Tahun 2008 adalah organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap Partai Politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing Partai Politik.

Dari 10 parpol peserta Pemilu 2014 yang memiliki kursi di DPR RI, semuanya memiliki sayap parpol meskipun berbeda penamaan. Seperti penamaan sayap parpol dilakukan Partai NasDem, PKS, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Hanura. Sementara PDIP, sayap parpol merupakan bagian dari komunitas juang Partai, selain organisasi kemasyarakatan dan organisasi-organisasi lainnya.⁹Terdapat 2 parpol menggunakan badan otonom untuk sayap parpolnya yakni PKB dan PPP. PAN menggunakan nama organisasi otonom untuk sayap parpolnya.

Bila menelaah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing parpol, fungsi sayap parpol masing-masing mendapatkan perhatian. Salah satu fungsi yang dikehendaki adalah menjadi kelompok kepentingan, Fungsi dimaksud seperti di Tabel 1.

Tabel 1
Fungsi Sayap Partai Politik Peserta Pemilu 2014

No.	Partai Politik	Fungsi di Parpol	Pengaturan
1	Partai NasDem	Bagian penyelenggara kader di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi.	AD Partai NasDem-Pasal 13.
2	PKB	Perangkat partai yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan partai, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan merupakan basis massa serta sumber kader Partai di berbagai segmen dan/atau lapisan sosial masyarakat	AD PKB-Pasal 44 (1).
3	PKS	?	?
4	PDIP	Melakukan pengorganisasian rakyat sesuai	AD PDIP-Pasal 54

⁹Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2015-2020.

		jenis komunitasnya sebagai upaya penggalangan pemilih di luar basis Partai.	(2).
5	Partai Golkar	Wadah perjuangan pelaksana kebijakan partai guna memenuhi kebutuhan strategis guna memperkuat basis dukungan partai	AD Partai Golkar-Pasal 28.
6	Partai Gerindra	Sebagai sumber anggota yang berperan sebagai pendukung Partai untuk membantu perjuangan Partai Gerindra melalui pelaksanaan Program Partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	ART Partai Gerindra-Pasal 23 (1).
7	Partai Demokrat	Wadah kaderisasi dan perjuangan pelaksanaan kebijakan partai guna memenuhi kebutuhan strategis memperkuat basis dukungan partai	AD Partai Demokrat-Pasal 97.
8	PAN	Membantu dewan pimpinan partai melakukan konsolidasi, akselerasi, dinamisasi dan optimalisasi kerja-kerja partai dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan tugas, kegiatan dan program partai di bidang-bidang dan atau kelompok-kelompok tertentu guna mencapai tujuan partai.	ART PAN-Pasal 58.
9	PPP	organisasi massa/profesi/kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada dan bernaung di bawah PPP, yang mengatur urusan rumah tangganya sendiri.	AD PPP, Pasal 76 (8).
10	Partai Hanura	-	-

Sementara bila menelaah jenis masing-masing sayap parpol, periksa Tabel 2, maka dapat dikategorikan beberapa basis yakni pelajar, mahasiswa, pemuda, perempuan, keagamaan, pengusaha, budaya dan hukum.

Tabel 2
Sayap Partai Politik Masing-Masing Parpol Peserta Pemilu 2014

No.	Partai Politik	Sayap Partai Politik
1	Partai NasDem	Ormas NasDem (1/2/2010), Garda Pemuda Nasional Demokrat (14/7/2011), Liga Mahasiswa NasDem (5/12/2011), Gerakan Massa Buruh-GemuruhNasDem (1/9/2012), Serikat Pedagang Restorasi Nasdem, Badan Advokasi Hukum Nasdem-Bahu, Liga Budaya Nusantara Nasdem, Garnita Malahayati.
2	PKB	Gerakan Pemuda Bangsa-Garda Bangsa (11/3/1999), Perempuan Kebangkitan Bangsa-Perempuan Bangsa.
3	PKS	Gerakan Persaudaraan Pemuda-GemaKeadilan (1/9/2005), Garuda

		Keadilan-GK,PKS Muda (10/5/2018).
4	PDIP	Banteng Muda Indonesia-BMI (2006) ¹⁰ , Baitul Muslimin Indonesia-BAMUSI (29/3/2007), Relawan Perjuangan Demokrasi-Repdem, ¹¹ Taruna Merah Putih-TMP (10/1/2008), Gerakan Nelayan Tani Indonesia-GANTI (13/4/2013).
5	Partai Golkar	SOKSI, Kosgoro, MKGR, Agnkatan Muda Pembaharuan Indonesia-AMPI (28/6/1978), Angkatan Muda Partai Golkar-AMPG (11/2/2002), Kesatuan Perempuan Partai Golkar-KPPG, Satkar Ulama Indonesia, Al-Hidayah, Himpunan Wanita Karya-HWK, Majelis Dakwah Indonesia.
6	Partai Gerindra	Satuan Relawan Indonesia Raya-SATRIA (30/5/2008) ¹² , Tunas Indonesia Raya-TIDAR (7/7/2008), Kristen Indonesia Raya-KIRA (18/11/2008), Gerakan Muslim Indonesia Raya-GEMIRA (2009),Perempuan Indonesia Raya-PIRA (2012), Gerakan Masyarakat Sanathana Dharma Nusantara-GEMA SADHANA, Barisan Tani, Wirausaha dan Seniman-BATARA NUSANTARA(16/3/2013), Persatuan Tionghoa Indonesia Raya-PETIR, Gerakan Kristiani Indonesia Raya-GEKIRA (11/4/2019).
7	Partai Demokrat	Forum Komunikasi Pendiri, Kader Muda Demokrat-KMD (23/8/2003), Generasi Muda Demokrat, Komite Nasional Pemuda Demokrat-KNPD (12/7/2004), Angkatan Muda Demokrat-AMD (9/3/2004), Perempuan Demokrat RI-PDRI, DPP Gerakan Penegak Pancasila Demokrat-GP Pandem, Relawan Biru Indonesia-RBI, Ikhwanul Muballigin, Gerakan Mahasiswa Merah Putih-Gema MP, Gerakan Rakyat Demokrat-GRD, Angkatan Muda Demokrat Indonesia-AMDI (28/10/2004), Angkatan Muda Indonesia Bersatu-AMIB, Aliansi Masyarakat Pemilih Jakarta-AMPIJA, Benteng Indonesia Raya-BIRA, Bintang Demokrat, Forum Komunitas Kebangsaan Indonesia Bersatu-Fokus Kirbar, Gerakan Cendekiawan Demokrat-GCD, Generasi Muda Demokrat-GMD(5/4/2004). Insan Muda Demokrat Indonesia-IMDI (20/5/2014).
8	PAN	Barisan Muda Penegak Amanat Nasional-BM PAN (23/8/1998), Garda Muda Nasional-GMN, Partai Bintang Reformasi-PBR (10/12/2011), Gerakan Wirausaha Desa(10/12/2011), Garda Muda Nasional-GMN (10/12/2011), Pandu Indonesia, (10/12/2011), Parra Indonesia(10/12/2011), Perempuan Amanat Nasional-PUAN.

¹⁰Sebagai sayap pertama PDIP sejak 2006. Awalnya bernama Komite Nasional Banteng Muda Indonesia yang dideklarasikan di Semarang, pada tanggal 29 Maret 2000. Periksa <https://bantengmudaindonesia.or.id/sejarah/>

¹¹<https://repdemnews.wordpress.com>

¹²mempunyai tugas dan misi khusus untuk menghimpun, menggalang, mengembangkan dan meningkatkan sumber daya dan potensi masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera serta membantu penanggulangan bencana nasional dalam segi sosial. Periksa <https://ppsatria.org/>

9	PPP	Wanita Persatuan Pembangunan-WPP, Gerakan Pemuda Ka'bah-GPK (29/3/1982), Generasi Muda Pembangunan Indonesia-GMPI, Angkatan Muda Ka'bah-AMK (30/11/1998).
10	Partai Hanura	Satuan Pelajar Mahasiswa-SAPMA HANURA, Gerakan Muda-GemaHanura, Gerakan Muda Nurani Rakyat-Gemura (21/1/2007), Pemuda Hati Nurani Rakyat-Pemuda Hanura (30/8/2007), Srikandi Hanura, Perempuan Hanura, Buruh Hanura, Satria Hanura, Lembaga Komitmen Tim Rakyat-LKTR, Ostra Hanura.

Bila memandang keberadaan dan tujuan masing-masing sayap parpol, tentunya berpotensi untuk menjadi kelompok kepentingan. Namun kenyataan tidak demikian. Sayap parpol pada umumnya belum berhasil mewujudkan seperti yang diinginkan parpol induknya.

Bahkan cenderung hanya 'dimanfaatkan' semata guna kepentingan pemilu mendulang suara parpol dari berbagai segmen masyarakat. Sehingga bisa dipastikan sangat sulit berperan dalam SPI sebagai kelompok kepentingan.

Sesuai dengan syarat Nasikun, sayap-sayap parpol belum mampu menjadi lembaga-lembaga bersifat otonom dengan wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan tanpa campur tangan dari badan-badan lain yang ada di luarnya. Termasuk perihal kedudukan lembaga-lembaga tersebut di dalam masyarakat yang bersangkutan harus bersifat monopolistis, tidak gampang karena tiap parpol memiliki sayap parpol dengan kemiripan basis yang sama.

Belum lagi terjadi kecenderungan dimana sayap-sayap parpol belum mampu mengikat anggota-anggota melalui keputusan-keputusannya. Termasuk kondisi internal sayap-sayap parpol belum sepenuhnya demokratis.

Oleh karena perlu dilakukan revitalisasi terhadap sayap-sayap parpol agar berperan di proses dan dinamika SPI sebagai kelompok kepentingan. Revitalisasi perlu dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

Pertama, sayap-sayap parpol harus merupakan yang bersifat otonom dengan wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan tanpa campur tangan dari badan-badan lain yang ada di luarnya. *Kedua*, kedudukan sayap-sayap parpol di dalam masyarakat yang bersangkutan harus bersifat monopolistis dari sisi keunikan dalam

mengaspirasikan kepentingan anggota dan masyarakat. *Ketiga*, peranan sayap-sayap parpol berperan dan dipatuhi anggotanya melalui keputusan-keputusannya serta *Keempat*, sayap-sayap parpol harus bersifat demokratis.

Sehingga demikian, organisasi sayap-sayap parpol tidak sekadar media parpol dengan masyarakat dengan berbasis kepentingan. Dimana sayap-sayap parpol menjadi rekrutmen politik dan kaderisasi. Melainkan dapat berfungsi menjadi kelompok kepentingan di dalam proses dan dinamika SPI.

Penutup

Organisasi sayap-sayap parpol seperti yang dikehendaki Pasal 12 huruf (j) Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan kehendak parpol masing-masing yakni menjadi kelompok kepentingan. Dengan menjadi kelompok kepentingan dalma konteks proses dan dinamika SPI, sayap parpol akan membantu tujuan parpol.

Namun, kenyataan berbicara lain. Untuk itu perlu dilakukan revitalisasi sayap parpol melalui 4 langkah yang ditawarkan Nasikun. Usahakan revitalisasi sayap-sayap parpol tentunya akan berakhir pada kemampuan sayap-sayap parpol berinteraksi mengelola dan memperjuangkan aspirasi anggotanya dan masyarakat ke dalam proses dan dinamika SPI.

Daftar Pustaka

Buku

- David E. Apter, Pengantar Analisa Politik, LP3ES, Jakarta
Haryanto, Sistem Politik: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1982
Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, Erlangga, Jakarta, 1985
Roy C. Macridis-Bernard E. Brown, Perbandingan Politik, Erlangga, Jakarta, 1992

Regulasi

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Makalah

- Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, SH, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003

AD/ART Partai Politik

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai NasDem, Lampiran SK DPP Nomor: SKEP-004/DPP-NasDem/II/2013 Tanggal 20 Pebruari 2013
Muhlisin Erse, Moch. Bisri (editor), 2014, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Kebangkitan Bangsa-Hasil Muktamar PKB Surabaya, 30 Agustus-1 September 2014, Jakarta: Sekretariat Jenderal DPP PKB
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga-AD/ART Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2016
Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2015-2020
Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya Tahun 2016 Nomor VI/MUNASLUB/GOLKAR/2016 Tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya
Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor 06-0043/Kpts/DPP-GERINDRA/2015 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Tahun 2014.
Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Direktorat Eksekutif, 2015, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional, Hasil Kongres ke IV Di Bali, Tahun 2016
Ketetapan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan No: 07/TAP/Muktamar VIII/PPP/2016 Tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Drs. Andreas Pandiangan, MSi
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Tempat/tanggal lahir : Pematang Siantar, 22 September 1966
4. Pekerjaan : Dosen Program Ilmu Komunikasi
Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Alamat : Jln. Jatingaleh III/138 Semarang (024) 8441 312
6. Status Perkawinan : Kawin
7. Riwayat Pendidikan :
 - a. Pasca Sarjana dari Program Studi Ilmu Politik Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1997
 - b. Sarjana Ilmu Pemerintahan dari Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1990
8. Bidang Keahlian :
 - a. Politik nasional dan politik daerah
 - b. Demokrasi dan pemilihan
 - c. Kebijakan publik
 - d. Komunikasi politik
9. Pengalaman Pekerjaan :
 - a. Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Jateng 2 (Juni-Agustus 2018)
 - b. Anggota Tim Pemeriksa Daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu-DKPP unsur tokoh Masyarakat untuk Provinsi Jawa Tengah (2014-sekarang)
 - c. Anggota Tim Bawaslu Award Jawa Tengah (Februari-Maret 201)
 - d. Sekretaris Tim Seleksi Panwas Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2015, (Nopember-Desember 2014)
 - e. Fasilitator Penguatan Kapasitas Perempuan Anggota Legislatif yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI -UNDP di 9 Provinsi (Juni-Agustus 2014)
 - f. Koordinator Daerah Lembaga Survey Nasional-LSN Jakarta untuk Jawa Tengah untuk Pemilu Legislatif 2014 (Januari-April 2014)
 - g. Fasilitator BRIDGE-Building Resources in Democracy, Governance and Elections (2011-2012)
 - h. Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah (September 2008-September 2013)
10. Pengalaman Penelitian :
 - a. Anggota peneliti, *Revitalisasi Lembaga Adat "Saniri" Sebagai Aktualisasi Otonomi Desa dalam Rekonsiliasi Pasca Konflik di Ambon*, Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Dikti, 2018-2019

- b. Bersama Andreas Ryan, *Identifikasi dan Dinamika Radio Komunitas Dalam Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) di Jawa Tengah*, (UNIKA Soegijapranata, 2018)
 - c. Bersama Abraham, *Identifikasi dan Analisis Komunikasi Politik Rumah Aspirasi Anggota DPR RI dan DPD RI: Studi Kasus Daerah Pemilihan Jawa Tengah*, (UNIKA Soegijapranata, 2017)
 - d. *Evaluasi Proses Tahapan dan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak 2015*, (kerjasama dengan KPU Kabupaten Demak).
 - e. *Perilaku Memilih (Voting Behavior) Tokoh Masyarakat Dalam Pemilu 2014: Studi Kasus Kabupaten Semarang*(kerjasama dengan KPU Kabupaten Semarang).
 - f. *Perilaku Memilih (Voting Behavior) Masyarakat Pedesaan Dan Pesisir Pantai Dalam Pemilu 2014: Studi Kasus Kabupaten Kendal* (kerjasama dengan KPU Kabupaten Kendal).
 - g. *Rekam Jejak Calon Anggota Legislatif pada Pemilu 2004 di Jawa Tengah*, sebagai analis, 2004 (Kerjasama Lembaga Studi Pers dan Pembangunan-LSPP Jakarta dengan Lembaga Studi Teranova)
 - h. *Analisis Dampak Lingkungan Hidup di Kali Tapak, Semarang*, sebagai anggota, 2003 (kerjasama Program Magister Lingkungan dan Perkotaan-PMLP UNIKA Soegijapranata dengan Kyoto University, Japan)
 - i. *Analisis Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup di Propinsi Jawa Tengah*, sebagai anggota, 2003 (kerjasama Program Magister Lingkungan dan Perkotaan-PMLP UNIKA Soegijapranata dengan Bapedalda Propinsi Jawa Tengah)
11. Karya Tulis/Publikasi :
- a. Andreas Pandiangan, *Akurasi Daftar Pemilih Pilgub 2018 dan Kestabilan Pilkada*, makalah pada Seminar Nasional Tahun 2018 "Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas", yang diselenggarakan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Surakarta, 22 September 2018.
 - b. Andreas Pandiangan, *Pengantar Ilmu Politik: Suatu Pengantar*, Semarang:UNIKA Soegijapranata, 2017
 - c. Andreas Pandiangan, *Pengawasan Pilkada Serentak di Tengah Keterbatasan dalam DKPP*, Evaluasi Pemilukada Serentak 2015, 2016
 - d. Andreas Pandiangan (editor), *Direktori UMKM 2016 Kota dan Kabupaten Semarang, Jilid 01-Kuliner*, UNIKA Soegijapranata, 2016
 - e. Andreas Pandiangan (editor), *Direktori UMKM 2016 Kota dan Kabupaten Semarang, Jilid 02-Kerajinan*, UNIKA Soegijapranata, 2016
 - f. Andreas Pandiangan (editor), *Direktori UMKM 2016 Kota dan Kabupaten Semarang, Jilid 03-Jasa*, UNIKA Soegijapranata, 2016
 - g. Bersama Hasyim Asy'ari, *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014 di Provinsi Jawa Tengah* dalam Moch. Nurhasim, Sri Nuryanti, Sri Yanuarti, *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014*, Jakarta: Electoral Research Institute-ERI, Pusat Penelitian Politik-P2 Politik LIPI dan The Australian Electoral Commission-AEC, 2015, hal. 345-398.